



HAK ASASI MANUSIA

Publik Didorong Bangun Kota Ramah HAM

JAKARTA, KOMPAS — Partisipasi publik sangat penting untuk membangun kabupaten atau kota yang ramah hak asasi manusia. Untuk itu, perlu digiatkan pendidikan dan pelatihan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM di daerah.

Hal ini mengemuka dalam jumpa pers peluncuran Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM di Indonesia", di Jakarta, Minggu (22/11).

Hadir dalam acara itu Koordinator Divisi Kampanye Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Yuli Asmini, Deputy Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Zainal Abidin, serta Senior Program Officer untuk HAM dan Demokrasi dari INFID Mugiyanto.

"Partisipasi publik diperlukan untuk mengetahui apa persoalan sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat. Lewat masyarakat ini pula, semua pihak dapat belajar bersama mencari akar masalah dan mencari langkah yang sesuai untuk membangun kota ramah HAM ini. Sebab, tiap daerah punya masalah yang berbeda," tutur Zainal.

Secara umum, jika mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, ada lima hal yang harus terpenuhi oleh daerah yang peduli HAM, yaitu hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas

kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak atas perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, pemenuhan HAM dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meski telah diatur undang-undang, masih sedikit kabupaten/kota yang menjalankan konsep ramah HAM. Penerapan di lapangan tidak mudah karena terkadang terbentur anggaran daerah. Hambatan lain adalah minimnya pengetahuan terkait HAM dan cara membuat produk hukum berbasis HAM.

Beberapa daerah yang telah menjalankan konsep ini adalah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kedua daerah ini dibantu oleh Komnas HAM, Elsam, dan INFID untuk membangkitkan partisipasi publik dan mendampingi pemerintah daerahnya dalam membuat peraturan daerah yang berlandaskan HAM.

"Tanpa partisipasi publik yang nyata, komitmen dalam menjaga kota berbasis HAM dan mekanisme kontrol terhadap pemerintah daerah tidak akan berjalan optimal," kata Yuli.

Predikat kabupaten/kota ramah HAM bukan berarti masalah pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebebasan, dan pelayanan hukum selesai. "Yang menentukan keberhasilannya adalah kepala daerah dan partisipasi masyarakat sipil. Kalau kepala daerahnya reformis, bisa lebih mudah," ujar Mugiyanto. (IAN)